

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Masalah etnisitas merupakan salah satu topik permasalahan yang senantiasa dialami oleh berbagai negara-negara di dunia. Dalam hal ini Indonesia pun sebagai sebuah negara yang penduduknya mempunyai latar belakang etnis, suku dan budaya yang beraneka ragam juga tidak terlepas dari masalah tersebut. Masalah etnis yang dihadapi bangsa Indonesia adalah mengenai keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia.

Secara spesifik sebenarnya ada berbagai sebutan untuk istilah Tionghoa perantauan atau etnis Tionghoa yang kita pakai untuk sebutan orang Tionghoa yang ada di Indonesia, namun dalam tulisan ini penulis akan menggunakan istilah etnis Tionghoa untuk menyebut orang China yang ada di Indonesia.

Selama ini etnis Tionghoa telah mengalami perlakuan diskriminatif dari pemerintah kita. Tindakan rejim Orde Baru yang melarang penggunaan bahasa dan aksara Tionghoa serta larangan merayakan ritual agama, budaya, dan tradisi Tionghoa serta penggantian istilah Tionghoa dengan pejoratif Cina ditambah dibentuknya Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) menimbulkan rasa takut dan enggan sebagian besar etnis Tionghoa untuk memasuki wilayah politik. Mereka perlahan-lahan digiring memasuki wilayah bisnis dan ekonomi semata-mata

Namun dengan terjadinya tragedi 13–15 Mei 1998 telah membuktikan bahwa tanpa didukung kekuatan politik, posisi dari orang-orang Tionghoa di Indonesia yang menurut mitos selama ini berkembang di masyarakat seolah-olah “sangat kuat” di bidang ekonomi, ternyata sangat rentan dan dapat dibuat tidak berdaya dalam hitungan jam saja. Telah terbukti pula bahwa keyakinan sementara etnis Tionghoa bahwa perlindungan yang paling aman adalah dengan cara mencantolkan diri kepada para penguasa ternyata keliru. Maka di masa Reformasi terjadilah perubahan, mereka sekarang mencoba memasuki wilayah-wilayah lain yang selama tiga puluh dua tahun tertutup baginya, sehingga etnis Tionghoa sekarang sudah berani tampil ke depan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menetapkan “PERANAN ETNIS TIONGHOA DALAM POLITIK PRAKTIS INDONESIA DI ERA REFORMASI” sebagai judul skripsi ini.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mengapa terjadi peningkatan peranan etnis Tionghoa dalam politik praktis di Indonesia, terutama selama era reformasi.
3. Untuk mengetahui apa saja indikator yang menjadi pendukung terjadinya peningkatan peranan etnis Tionghoa pada politik praktis Indonesia.
4. Studi ini berupa upaya untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman ras, bahasa, dan agama, dengan memiliki beberapa suku dan etnis yang berbeda. Diantara beberapa etnis yang ada di Indonesia etnis Tionghoa merupakan suku atau etnis yang dianggap sebagai kelompok etnis yang datang dari luar Indonesia, yaitu RRC (Republik Rakyat China). Diperkirakan generasi pertama mereka datang ke Indonesia pada abad ke-17 atau abad ke-18 dengan membawa bahasa mereka masing-masing. Hal ini terjadi karena mereka merupakan golongan minoritas yang heterogen.

Mengenai istilah "*Etnis China*" dan "*Tionghoa*" sendiri sebenarnya memiliki arti yang sama, tetapi maknanya berbeda. Pada umumnya sebutan bagi orang-orang China adalah seperti "China Perantauan", "China keturunan", atau "Etnis China".

Menurut Purcell, "Etnis China" di Indonesia adalah :

"Seluruh migran China dan keturunan yang tinggal dalam ruang lingkup budaya Indonesia dan tidak tergantung dari kewarganegaraan, bahasa yang melingkupi budaya China mereka yang memandang dirinya sebagai "China" atau dianggap demikian oleh lingkungannya. Pada saat bersamaan mereka berhubungan dengan China perantauan lain atau dengan Tiongkok secara sosial atau lainnya, tanpa memandang kebangsaan, bahasa atau kaitan erat dengan budaya China."¹

Sementara itu Leo Suryadinata juga memberikan definisi yang tidak jauh berbeda, yaitu: "Istilah China Indonesia digunakan untuk merujuk pada etnis China di Indonesia yang memiliki nama keluarga, marga, tanpa memandang warganegaranya."²

¹ Yusu Liem, *Prasangka Terhadap Etnis China : Sebuah Intisari*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000.

² Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Perkembangan Budaya*, IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Pada tahun 1965, istilah “Tionghoa” dihapus dan dikembalikan untuk menggunakan istilah “Etnis China” yang telah diputuskan dalam gagasan seminar Angkatan Darat³. Namun sebenarnya orang-orang Tionghoa ini lebih suka bila mereka disebut “Etnis Tionghoa”, karena menurut mereka kata “China” ini selalu dipakai oleh masyarakat Indonesia untuk mengumpat mereka, dan mengandung makna penurunan nilai dan stigma, setidaknya akan menambah konotasi negatif yang selama ini telah melekat pada diri mereka.

Secara kultural, etnis Tionghoa ini dibagi menjadi Tionghoa peranakan dan Tionghoa totok. Adapun definisi Tionghoa peranakan yang biasa disebut dengan “etnis Tionghoa” yaitu: “Orang Indonesia yang berasal dari China dan sejak generasi pertama atau selanjutnya tinggal di Indonesia, berbaur dengan penduduk setempat dan menguasai satu atau lebih bahasa yang digunakan di Indonesia”⁴.

Sedangkan untuk Tionghoa Totok atau singkeh (pendatang baru), menurut para sosiolog dan antropolog adalah: “Generasi pertama China dan seterusnya yang keturunan bukan dari perkawinan campuran dengan penduduk setempat (pribumi) dan masih fasih satu atau lebih dialek China serta masih mempunyai kedekatan dengan budaya China”⁵.

Pada awal kedatangan Etnis Tionghoa ke Indonesia, sebagian besar dari mereka masih memeluk agama dan kepercayaan tradisional yaitu ajaran Konfusianisme yang

merupakan salah satu kepercayaan tradisional yang dianut oleh etnis Tionghoa di Indonesia.

Adapun tujuan dari Konfusianisme ini adalah menegakkan pemerintahan dalam masyarakat dengan cara meluruskan cara berfikir bagi orang yang memerintah maupun rakyat, atas dasar pembangunan watak yang takwa kepada Tuhan, memenuhi kewajiban sosial serta pemerintahan yang bersih. Cara tercepat untuk mencapai tujuan itu ialah dengan bekerja dari atas sampai dengan cara memperbaiki cara berfikir dan mental para raja dan bangsawan, sampai mereka mengenal prinsip *noblesse oblige* dengan tujuan mereka menjadi panutan rakyat.⁶

Namun selama keberadaannya di Indonesia etnis Tionghoa ini mengalami suatu proses pergeseran, dari yang sebelumnya menganut agama tradisional seperti Konfusianisme menjadi menganut agama-agama seperti Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Hal ini terjadi sebagai dampak dari proses asimilasi yang mereka alami, karena itulah golongan yang paling banyak mengalami proses ini adalah kaum Tionghoa peranakan. Sebagai mana yang telah penulis jelaskan di atas sebelumnya, Tionghoa peranakan merupakan hasil perkawinan kaum Tionghoa totok dengan wanita-wanita pribumi, sehingga sangat memungkinkan bagi mereka untuk ikut memeluk agama yang dianut oleh wanita pribumi yang mereka kawini. Namun demikian, meskipun sebagian besar dari mereka sekarang sudah tidak menganut ajaran Konfusianisme lagi tetapi nilai-nilai dan tradisi-tradisi dari ajaran

⁶ Lasiyo, "Filsafat Etika dan Spiritualitas", *Konfusianisme di Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri* Editor Interfeld, Yogyakarta, 1995, hal. 20

konfusianisme tersebut tetap mereka pelihara dan jalankan sampai sekarang dan pemerintah kita sendiri pun sekarang sangat mendukung hal tersebut, diantaranya dengan dikeluarkannya Keppres NO. 19/2002 oleh Presiden Megawati yang menyatakan hari raya Imlek sebagai hari libur nasional.

Sejarah mencatat bahwa sejak jaman penjajahan etnis Tionghoa telah diperlakukan “lebih” dibanding penduduk Indonesia, penjajah melakukan itu sebagai bagian dari politik pecah belah penduduk di negara jajahannya, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang merupakan asal mula konflik di antara etnis Tionghoa dengan penduduk Indonesia.

Keberhasilan etnis Tionghoa dalam usaha perdagangan yang utama adalah berkat perlakuan Belanda yang telah memberikan fasilitas dan keuntungan-keuntungan kepada mereka, yaitu dengan jalan :

- a) Memberi keleluasaan bergerak dan berusaha
- b) Memberi keuntungan dalam bidang pemupukan modal
- c) Memberi keuntungan di bidang organisasi dan skill
- d) Disamping hal-hal tersebut diatas modal pokok khas orang Tionghoa yaitu berusaha dengan tekun dan hemat.⁷

Tujuan hidup etnis Tionghoa adalah meraih sukses dalam usaha baik sukses dalam bidang perdagangan, industri, perbankan, maupun pertambangan, sehingga tidak banyak dari mereka yang tertarik pada kehidupan politik. Mereka mau terjun dalam kehidupan politik apabila berhubungan erat dengan usaha perekonomian.

Adanya jurang pemisah antara etnis Tionghoa yang sangat sukses di bidang perekonomian dan cenderung mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah dengan masyarakat pribumi yang kebanyakan berada di lapisan masyarakat yang paling bawah memicu konflik diantara keduanya. Sejarah sendiri mencatat tentang konflik yang terus terjadi antara penduduk pribumi dengan etnis Tionghoa, kerusuhan dan kekerasan anti etnis Tionghoa yang terus menerus terjadi. Pada tanggal 1 Oktober 1965 terjadi percobaan kudeta oleh gerakan yang menamakan dirinya sebagai "Gerakan 30 September", dengan melakukan aksi penculikan dan pembunuhan atas enam orang Jenderal Angkatan Darat serta menguasai pemancar radio Jakarta, pusat telekomunikasi, dan istana Kepresidenan. Sore hari pada hari yang sama gerakan itu runtuh di Jakarta oleh Komandan Kostrad Mayor Jenderal Suharto. Ternyata dalam peristiwa G30 S/PKI, Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) ikut andil di dalamnya sehingga membuat orang Indonesia asli pada umumnya cenderung memandang setiap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sebagai pendukung PKI. Berakhirnya peristiwa G30 S/PKI ternyata tidak membawa kedamaian tetapi justru banyak terjadi kekerasan yang melibatkan etnis Tionghoa di Indonesia, baik yang menyangkut persoalan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Beberapa etnis Tionghoa yang menjadi anggota PKI atau yang dianggap sebagai simpatisan PKI dibunuh. Kekerasan anti Tionghoa selain pembunuhan juga terjadi pengrusakan terhadap harta milik, seperti perampasan, perampokan, pembakaran toko, sekolah, rumah dan mobil.

Atas peristiwa keterlibatan etnis Tionghoa dalam peristiwa kudeta G30 S/PKI, pemerintah Orde Baru mengambil tindakan drastis terhadap etnis Tionghoa di bidang sosial, budaya dan politik. Negara mengeluarkan ketentuan-ketentuan pokok/kebijaksanaan tentang masalah etnik Tionghoa, yaitu :

“ Resolusi MPRS No III / Res / MPR / 1966, tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa tanggal 5 Juli 1966. Hal – hal yang relevan dalam Keppres ini antara lain: merealisasikan dengan konsekuensi larangan perangkapan kewarganegaraan; mempercepat proses integrasi melalui asimilasi warga negara keturunan asing; menghilangkan segala hambatan-hambatan yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan mereka dengan warga negara asli. Keputusan Presidium Kabinet No. 127 / U / Kep / 12 / 1966 mengenai ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama China. Keputusan ini berkaitan dengan prosedur yang sangat mempermudah etnik China yang ingin ganti (secara sukarela) dengan nama Indonesia⁸ .”

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lain berupa pelarangan diadakannya perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat etnis Tionghoa secara menyolok di depan umum, melainkan hanya dilakukan dalam lingkungan keluarga saja. Sebelumnya tujuan atas dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut oleh pemerintah Orde Baru adalah untuk mengurangi yang konflik antara orang pribumi dengan etnis Tionghoa pada masa itu itu. Namun pada kenyataannya justru terjadi penyimpangan-enyimpangan yang dapat mempengaruhi proses pembaruan etnis Tionghoa di Indonesia.

Dalam usahanya untuk membendung konflik yang terjadi antara Etnis Tionghoa dengan penduduk Indonesia, dalam mengeluarkan kebijakannya pemerintah Orde Baru mengusung paham asimilasi. Yang dimaksud dengan paham asimilasi disini adalah suatu proses percampuran etnis Tionghoa ke dalam bangsa Indonesia di mana

⁸ Alfan Hamzah, *Konflik Etnis Nasional: Warga Tionghoa Mengalami Kesulitan Selama 1966-1967*

pendukung paham asimilasi tidak merasa perlu untuk mempertahankan budaya dan tradisi aslinya karena dianggap akan mempersulit proses percampuran ke dalam bangsa Indonesia.⁹ Dalam pandangan paham asimilasi, untuk menjadi orang Indonesia, orang Tionghoa harus dilebur ke dalam penduduk Indonesia asli sehingga kaum minoritas Tionghoa tidak lagi akan menjadi suatu kelompok tersendiri.

Sebagai akibat dari kebijakan yang bersifat asimilatif ini maka akhirnya etnis Tionghoa ini mengalami krisis identitas karena kehilangan jati dirinya sendiri akibat dileburkan ke dalam bangsa Indonesia Indonesia. Mereka dilarang untuk melakukan berbagai ritual agamanya seperti yang saya uraikan di atas sebelumnya.

Tindakan diskriminatif oleh pemerintah Orde Baru menimbulkan rasa takut dan enggan sebagian besar etnis Tionghoa untuk memasuki wilayah politik. Mereka perlahan-lahan digiring untuk memasuki wilayah bisnis semata dan dikurung di sana untuk tiga puluh dua tahun lamanya sampai runtuhnya rezim tersebut.

Karena itulah pada era Orde Baru kita hanya menemukan segelintir orang Tionghoa yang berpartisipasi dalam bidang politik, antara lain: Kwik Kian Gie (PDI Perjuangan), Yap Thiam Hien alm, Soe Hok Gie alm, Christianto Wibisono, dan Arief Budiman. Selain itu juga terdapat para cendekiawan Tionghoa Katolik, seperti Liem Bian Kie serta adiknya Liem Bian Koen (Sofyan Wanandi, salah seorang tokoh CSIS) dan Harry Tjan yang menjadi bagian dari tenaga pemikir Golkar-nya Ali Murtopo, yang merupakan politisi etnis Tionghoa. Mereka adalah orang-orang yang

⁹ Herry Antono, *Integrasi Vs Asimilasi*, Bandung, 2000.
<http://www.indonesiamedia.com/rubrik/opini/opini00oktober.htm>
Diakses pada hari Jum'at, Tgl 4 Februari 2005

sangat idealis dan sangat peduli dengan masalah bangsa Indonesia. Namun karena mereka hanyalah golongan minoritas dalam komunitas politik Indonesia sehingga perjuangan mereka kurang mendapat perhatian dan penghargaan dari masyarakat Indonesia.

Pahan asimilasi yang semula diusung oleh rejim Orde Baru digantikan dengan pahan integrasi yang sebenarnya pertama kali dikeluarkan oleh tokoh-tokoh Baperki pada masa pemerintahan Soekarno. Maka dengan dimulainya era Reformasi, paham ini dimunculkan kembali kepermukaan. Paham integrasi yang dimaksud disini sebenarnya secara sederhana dapat diartikan sebagai proses percampuran etnis Tionghoa ke dalam bangsa Indonesia, tanpa meninggalkan budaya aslinya. Dan dalam pengertian yang lebih spesifik, integrasi ini lebih tepat sebagai "Penggabungan" etnis tionghoa ke dalam bangsa Indonesia sebagai "suku baru" lengkap dengan budaya.¹⁰ Sehingga hal tersebut semakin mendorong etnis Tionghoa agar dapat lebih menunjukkan partisipasinya dalam perpolitikan di Indonesia.

Seiring dengan runtuhnya rejim Orde Baru etnis Tionghoa mulai berani muncul kepermukaan dan mengambil posisi untuk dapat lebih berpartisipasi dalam peta perpolitikan Indonesia, terutama hal-hal yang menyangkut politik praktis di Indonesia. Politik adalah hal yang ada hubungannya dengan kekuasaan. Ada banyak definisi dari politik, dan dalam mendefinisikan politik praktis salah satu acuan yang akan digunakan penulis adalah definisi politik yang dikemukakan oleh H. J. Morganthau yaitu "power means man's control over the minds and actions of

other men",¹¹ yang artinya seseorang dapat menikmati kekuasaan, bila orang itu dapat mempengaruhi perilaku dan pikiran orang lain. Sehingga dapat kita artikan bahwa sebenarnya politik itu sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Politik praktis sendiri sebenarnya tidak mempunyai definisi baku sebagaimana halnya 'politik'. Politik praktis disini sebenarnya hanyalah semacam ungkapan yang sering digunakan dalam menjelaskan aktivitas politik seseorang atau suatu kelompok kepentingan yang berkaitan langsung dalam usahanya untuk memperoleh kekuasaan. Dalam hal ini terutama mengenai keterlibatan etnis Tionghoa dalam partai-partai politik dan jabatan publik terutama untuk mewakili kepentingan etnis Tionghoa dalam pemerintahan Indonesia maupun hal-hal yang menyangkut kekuasaan itu sendiri.

Jika kita cermati lebih teliti terdapat perubahan yang cukup drastis pada partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia seiring dengan terjadi pergeseran rejim pemerintahan. Pada masa pemerintahan Soekarno, etnis Tionghoa di Indonesia diijinkan untuk membentuk organisasi politik yang terpisah seperti Baperki yang didominasi peranakan dan Qiao Zong (organisasi umum asosiasi warga Tionghoa) yang didominasi golongan totok. Terdapat sejumlah etnis Tionghoa di parlemen dan menteri kabinet, dua di antaranya Tan Kiem Liong, menteri pendapatan, keuangan dan pemeriksaan keuangan, serta Oei Tjoe Tat, menteri negara.¹² Pada masa Suharto kedua organisasi tersebut dibubarkan sesuai dengan prinsip kebijakan asimilasi yang ditetapkan pemerintah.

¹¹ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, , New York: Alfred A. Knopf, 1956.

¹² Leo Suryadinata, *Ibid.*, hal. 98

Tidak lama setelah Suharto tampil ke puncak kekuasaan, pemerintahannya melarang semua organisasi sosial politik etnis Tionghoa. Segolongan kecil etnis Tionghoa yang berkeinginan untuk terlibat dalam kegiatan politik harus bergabung dengan organisasi-organisasi berasimilasi. Salah satu pilihan yang menarik adalah Golkar yang disponsori pemerintah dan merupakan partai yang berkuasa di Indonesia atau organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan Golkar, Jusuf Wanandi (Liem Bian Kie) dan Harry Tjan adalah dua contoh terpenting etnis Tionghoa yang bergabung dengan Golkar. Di DPR hanya terdapat seorang peranakan yaitu Djoko Sudyatmiko alias Lie Giok Hauw sebagai wakil Golkar dalam DPR periode 1982-1987.¹³

Kepentingan etnis Tionghoa diartikulasikan melalui tokoh-tokoh Tionghoa yang memiliki hubungan dengan para pejabat, sejumlah kecil institusi yang disponsori pemerintah seperti Bakom dan lembaga setengah resmi seperti CSIS juga sering digunakan untuk menyalurkan berbagai tekanan etnis Tionghoa, dan sistem cukong juga merupakan saluran lain bagi orang Tionghoa untuk memberikan masukan dalam bidang politik. Organisasi lain yang didominasi etnis Tionghoa yang digunakan sebagai kelompok penekan adalah Prasetya Mulya yang didirikan pada tahun 1980. Organisasi ini sebenarnya merupakan sebuah yayasan yang bertujuan membantu pemerintah melaksanakan program-program sosial.¹⁴

¹³ *loc.cit.*

¹⁴ *Ibid*, hal. 53.

Jika sebelumnya pada masa pemerintahan Orde Baru partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia lebih bersifat perorangan dengan menggabungkan diri pada partai-partai politik besar seperti PDI Perjuangan, Golkar, PAN dan lainnya maka pada era reformasi, setelah dicabutnya kebijakan-kebijakan yang berdasarkan paham asimilasi yang diskriminatif dan digantikan dengan kebijakan pemerintah yang berpaham integrasi, mulai terjadi perubahan pada bentuk partisipasi mereka. Etnis Tionghoa mulai muncul kepermukaan sebagai kelompok kepentingan yang tentunya berusaha mewakili golongannya. Kemudian mulai bermunculanlah berbagai LSM, Ormas, dan partai politik yang didirikan oleh berbagai kalangan etnis Tionghoa dengan visi dan misinya masing-masing.

Berbagai kelompok peranakan Tionghoa juga segera membentuk partai politik, paguyuban, perhimpunan, LSM dsbnya, antara lain Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI), Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI), Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI), Solidaritas Pemuda Pemudi Indonesia Untuk Keadilan (SIMPATIK) dsbnya. Namun dalam perjalanannya, karena banyak menghadapi kendala semangat yang pada mulanya mengebuk-gebu, perlahan-lahan mulai menyurut. Di samping itu seperti juga yang terjadi pada partai-partai politik dan organisasi nasional lainnya, perpecahan telah menjadi mode yang menimpa partai-partai politik dan organisasi-organisasi di kalangan etnis Tionghoa.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa indikator peningkatan peranan etnis Tionghoa dalam politik praktis Indonesia adalah-

- Pada masa Orde Baru tidak ada jaminan keamanan bagi etnis Tionghoa dalam menjalankan kehidupannya, yang berupa kebijakan atau peraturan perundangan, maka dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang berpaham integrasi merupakan satu jaminan keamanan bagi mereka.
- Pada masa Orde Baru, etnis tionghoa mengartikulasikan kepentingannya secara perorangan, sedangkan pada era Reformasi mereka sudah berani mengartikulasikan kepentingannya melalui kelompok kepentingan, LSM-LSM, ataupun organisasi masyarakat yang mereka bentuk.
- Tadinya tidak ada partai politik yang berbasis Tionghoa pada masa Orde Baru, sekarang di era Reformasi ini mulai banyak yang bermunculan.
- Pada masa Orde baru hampir tidak ada etnis Tionghoa yang menduduki posisi sebagai Menteri, maka setelah era Reformasi ada.

Jika kita mencoba untuk membandingkan tingkat partisipasi politik etnis Tionghoa Indonesia dari masa Orde Baru dengan era Reformasi, maka kita akan dapat melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini didukung juga dengan adanya perubahan dalam prosedur dan tata cara pemilihan anggota badan legislatif. Sistem pemilihan secara langsung sangat memberi kesempatan bagi kelompok etnis ini untuk maju ke depan dan mengapresiasi peranannya.

Hasil pemilu 1999, ada beberapa orang etnis Tionghoa yang berhasil menjadi anggota DPR, MPR dan DPRD. Di DPR ada Kwik Kian Gie (kemudian diganti karena diangkat menjadi menteri) dan Ir Tiandra Wijaya Weng dari PDI P. Alvin Lia

Ling Piao dari PAN, Ir Enggartiasto Lukita dari Golkar dan LT Susanto dari PBI. Di MPR di samping mereka yang telah menjadi anggota DPR ada Hartarti Murdaya (Chow Lie Ing) dari Walubi yang mewakili Utusan Golongan dan Daniel Budi Setiawan yang menjadi wakil Utusan Daerah Jawa Tengah dari PDI-P. Seharusnya ada lagi seorang etnis Tionghoa yang menjadi anggota DPR yaitu Frans Tshai yang mewakili PDI-P Bogor, namun pada saat-saat terakhir ia disingkirkan dan tempatnya diberikan kepada orang lain. Di DPRD- DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya ada beberapa orang etnis Tionghoa yang mewakili PBI. Jadi melalui berbagai parpol ada 5 orang etnis Tionghoa yang berhasil menjadi anggota DPR dan 7 orang menjadi anggota MPR.¹⁵

Publikasi media sepanjang pemilu legislatif dan pilpres 2004 juga mencatat beberapa perkembangan. Selama pemilu legislatif, sejumlah media mencatat hampir 200 caleg Tionghoa yang terdaftar (termasuk DPRD), meskipun pada akhirnya hanya sebagian kecil yang berhasil mendapatkan kursi. Namun tetap terjadi perubahan jika dibandingkan dengan jumlah caleg pada Pemilu 1999 yang mencapai angka 150 caleg.¹⁶

Peningkatan kuantitas bisa dirasakan, tetapi masih banyak pembenahan kualitas yang harus dilakukan. Refleksi dari sejumlah kegiatan, di mana kader-kader politik

¹⁵ Benny G. Setiono, *Artikel: Etnis Tionghoa dan Partai Politik*, <http://indonesiamedia.com/2003/02/berta-0203-tionghoaparpol.htm>, Diakses pada tanggal 9 Agustus 2005.

¹⁶ Christine Susanna Tjhin, Researcher, Department of Politics and Social Change, *Partisipasi politik Tionghoa dan demokrasi*, Diakses tgl 15 April 2005. http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=265&id=4&tab=0

Tionghoa berkesempatan untuk unjuk gigi dan mengilustrasikan beberapa hal. Di berbagai daerah muncul berbagai kreasi partisipasi politik yang dulu terasa minim sekali, mulai dari peningkatan keanggotaan partai politik, inisiatif debat/diskusi politik oleh asosiasi Tionghoa, kampanye partai politik, sampai sosialisasi proses pemilu.

D. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang seperti tersebut di atas, maka dapat kita tarik suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:

“Mengapa terjadi peningkatan peranan etnis Tionghoa dalam politik praktis Indonesia pada era Reformasi?”

E. Kerangka Pemikiran /Teoritik

Kerangka pemikiran/teori sangat diperlukan untuk membahas suatu permasalahan, teori ini dibangun oleh beberapa konsep dimana konsep–konsep itu harus saling dihubungkan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.¹⁷ Maka untuk menjelaskan pokok permasalahan diatas, penulis akan menggunakan teori dan konsep–konsep sebagai berikut:

¹⁷.....

1. Teori Sistem Politik

Istilah sistem politik sering disebut-sebut dalam kehidupan sehari-hari, dan telah banyak pula yang mengetahui pengertian sistem politik. Namun biasanya masing-masing orang memandang sistem politik dari sudut pandang yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. David Easton menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan alokasi daripada nilai-nilai, dalam mana pengalokasian daripada nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan.¹⁸ Lebih lanjut David Easton menyatakan pula bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah lakun sosial, melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.¹⁹

Hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya sangat erat. Sistem politik dipengaruhi oleh segala macam hal yang terjadi di sekelilingnya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan mengalir masuk ke dalam sistem politik. Hal yang serupa juga terjadi pada Indonesia. Pengaruh lingkungan, baik yang intrasosietal maupun yang extrasosietal mengalir masuk ke dalam sistem politik sebagai *input* baik itu yang berupa tuntutan-tuntutan (*demands*) maupun sebagai dukungan-dukungan (*supports*). Hasil daripada sistem politik disebut *output* ini

¹⁸ David Easton, *A Framework for Political Analysis*, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J.

yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru dicabut agar mereka bisa memperoleh haknya sebagai warga negara.

Sebelum akhirnya berbagai tuntutan ini bisa diterima oleh pemerintah, berbagai tuntutan ini sebelumnya juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari dalam pemerintahan itu sendiri maupun dari luar pemerintahan. Dukungan yang datang dari dalam pemerintahan berupa, perubahan sistem politik yang terjadi di Indonesia, yang tadinya dengan sistem politik yang bersifat otoriter di bawah pimpinan rejim Soeharto, kemudian digantikan dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis di era Reformasi ini. Hal ini tentunya merupakan dukungan yang memberikan jalan bagi etnis Tionghoa untuk bisa mengapresiasi pentingnya. Selain itu kemudahan di bidang informasi juga memungkinkan masyarakat di seluruh dunia melihat dengan langsung fakta-fakta terjadinya tindakan diskriminatif yang menimpa etnis Tionghoa Indonesia pada Tragedi Mei '98. Hal ini tentunya telah merusak citra buruk Indonesia di mata masyarakat Internasional. Maka dari itu berbagai pihak berusaha untuk mendukung keberadaan etnis Tionghoa untuk memulihkan kembali nama baik Indonesia di masyarakat Internasional.

Input yang berupa dukungan dan tuntutan ini setelah diterima pemerintah dan masuk ke dalam sistem politik yang akhirnya menghasilkan *output* yang berupa pencabutan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpaham asimilasi dan digantikan dengan lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpaham integrasi. Dengan adanya berbagai kebijakan ini tentunya merupakan angin segar bagi etnis Tionghoa

Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan kebebasan bagi mereka dalam mengekspresikan diri kepentingan mereka di bidang politik. Hal ini ditandai dengan banyaknya lahir berbagai partai politik dan ormas-ormas yang berbasis Tionghoa. Yang kemudian menunjukkan partisipasi politiknya dalam Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Untuk lebih lengkapnya lagi, untuk menunjukkan dampak dari keberadaan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpaham integrasi ini, bagaimana dampaknya terhadap peningkatan partisipasi etnis Tionghoa dalam politik praktis Indonesia penulis akan menggunakan konsep *Human Security* berikut di bawah ini.

2. Konsep *Human Security*

Keamanan (*security*) secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan diri (*survival*) dalam menghadapi ancaman yang nyata (*existential threat*).²¹ Secara tradisional pemikiran tentang keamanan seringkali dikaitkan dengan tujuan dan pengendalian kapabilitas militer dalam menghadapi ancaman penggunaan kekerasan bersenjata. Dengan kata lain, pendekatan keamanan secara konvensional lebih didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang berdimensi militer.

Dewasa ini, pendekatan tentang masalah keamanan lebih diperluas kepada isu-isu yang bersifat multidimensional terutama dimensi non militer, seperti masalah etnisitas, konflik antar etnis, degradasi lingkungan, masalah kemiskinan, perdagangan

²¹ Barry Buzan, Ole Weaver, and Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, dalam Nurani Chandrawati, *Perkembangan Konsep-konsep Keamanan dan Relevansinya terhadap Dinamika*

obat-obatan terlarang, perdagangan perempuan dan anak, pekerja ilegal, terorisme, dan penyebaran penyakit menular.

Konsep keamanan dapat dibagi menjadi lima dimensi.²² Dimensi pertama yang perlu kita ketahui dari konsep keamanan adalah *the origin of threats*. Bila pada masa Perang Dingin, ancaman-ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari pihak luar atau eksternal sebuah negara, maka pada masa kini berbagai ancaman dapat berasal, baik dari lingkungan domestik maupun global. Dalam hal ini, ancaman yang berasal dari dalam negeri biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti masalah etnis, perbedaan budaya, dan agama. Konflik-konflik serupa juga melanda Indonesia. Berbagai tindakan kekerasan yang terjadi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia seperti peristiwa Mei '98 yang dipicu oleh konflik antara etnis Tionghoa di Indonesia dengan masyarakat Indonesia sendiri, telah menyedot perhatian nasional dan bahkan internasional.

Dimensi kedua adalah *The nature of threats*. Secara tradisional, dimensi ini menyoroiti ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan nasional dan internasional sebagaimana disebut di atas telah mengubah pula sifat ancaman menjadi lebih rumit. Dengan demikian, persoalan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif dikarenakan menyangkut pula aspek-aspek lain seperti demokratisasi dan HAM. Akibatnya, isu-isu yang mengemuka semakin beragam yang meliputi:

²² Anak Agung Banyu Perwita, *Konsep Keamanan Manusia Semakin Relevan*. Dalam <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0406/01/opi02.html>. Di akses pada tanggal 7 Desember 2004, dan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam ———, *Human Security dalam Konteks Global dan Relevansinya Bagi Indonesia*, Analisa CSIS Tahun XXXII/2003 No.i, 2003, hal. 71-72.

konflik SARA, pelanggaran HAM terhadap etnis Tionghoa, ketidakamanan etnis Tionghoa dalam menjalankan kehidupannya sebagai akibat dari perlakuan diskriminatif baik itu oleh pemerintah Indonesia maupun oleh penduduk Indonesia sendiri.

Mengemukakan berbagai isu di atas sebagai sifat-sifat baru ancaman berkorelasi dengan dimensi ketiga yaitu *changing respons*. Bila selama ini respon-respon yang muncul adalah tindakan kekerasan atau militer semata, maka kini isu-isu tersebut perlu pula diatasi dengan berbagai pendekatan non-militer. Dengan kata lain, pendekatan keamanan yang bersifat militeristik sepatutnya diganti dengan pendekatan-pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial-budaya.

Dimensi berikutnya yang juga akan mengarahkan kita pada perlunya memahami konsep keamanan baru adalah *changing responsibility of security*. Bagi para pengusung konsep keamanan tradisional, negara adalah 'organisasi politik' terpenting yang kewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya. Sementara itu, para penganut konsep keamanan 'baru' menyatakan bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi akan sangat tergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global.

Dimensi terakhir adalah *core values of security*. Berbeda dengan kaum tradisional yang memfokuskan keamanan pada *national independence*, kedaulatan, dan integritas teritorial, kaum modernis melihat bahwa mengemukakan nilai-nilai baru penghormatan pada HAM dan demokratisasi merupakan sesuatu yang perlu

Konsepsi *human security* diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam *Human Development Report* 1994 yang dikeluarkan oleh UNDP, dimana UNDP mengajukan rumusan baru untuk keamanan yang diawali dengan pemahaman bahwa keamanan berarti “keamanan dari ancaman terus-menerus dari rasa lapar, penyakit, kejahatan, dan penindasan..... perlindungan terhadap gangguan yang membahayakan atas kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, masyarakat atau lingkungan”. lebih jauh UNDP mengidentifikasi enam komponen *human security*, yaitu *economic security*, *food security*, *health security*, *environmental security*, *personal security*, *community security*, dan *political security*.²³

Menurut *Human Development Report* yang dikeluarkan UNDP, definisi konsep keamanan manusia mengandung dua aspek penting. Pertama, keamanan manusia merupakan “keamanan (manusia) dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi”. Kedua, keamanan manusia pun mengandung makna adanya “perlindungan atas pola-pola kehidupan harian seseorang-baik di rumah, pekerjaan, atau komunitas dari gangguan-gangguan yang datang secara tiba-tiba serta menyakitkan”.²⁴

Berdasarkan dua aspek penting dari konsep keamanan di atas, maka kita dapat melihat fenomena yang terjadi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia selama ini khususnya pada masa Orde Baru, terdapat kekurangan jaminan dari pemerintah

²³ Philips Jusario Vermonte, *Transnational Organized Crime: Isu dan permasalahannya*, Analisis CSIS Tahun XXXI/2002 No.1, 2002, hal.47.

²⁴ Lander Herya Subianto, *Konsep Human Security: Tinjauan dan Dampak Analisis CSIS Tahun*

sebagai 'organisasi politik' terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya, yang terdapat pada salah satu dimensi konsep keamanan yaitu *changing responsibility of security*. Sebagai cerminan kita dapat melihat pada peristiwa yang terjadi pada bulan Mei '98. Pada masa itu terjadi tindak kekerasan yang besar-besaran terhadap etnis Tionghoa di Indonesia dan pemerintah kita membiarkannya saja tanpa berbuat apa-apa untuk menghentikan kejadian tersebut. Selain itu semua perlakuan diskriminatif yang dilakukan baik itu oleh pemerintah Indonesia sendiri maupun oleh masyarakat kita merupakan bukti betapa tidak terlindunginya etnis Tionghoa di Indonesia dari segala tindak kekerasan yang menimpa mereka. Di samping itu jika selama ini tidak ada perlindungan khusus terhadap hak-hak yang dimiliki etnis Tionghoa dalam menjalankan kehidupannya sehari, maka selama era reformasi ini lahir kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sebagai pencabutan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang bersifat diskriminatif, seperti Inpres No.14/1967 yang dijadikan tameng pembersihan segala hal yang berbau Tionghoa semasa Orde Baru, sudah dicabut pada masa pemerintahan Gus Dur; untuk kemudian diganti dengan Keputusan Presiden NO.6/2000 yang memberikan keleluasaan kepada etnis Tionghoa di Indonesia dalam melaksanakan segala tradisi, maupun ritual-ritual keagamaannya. Presiden Habibie juga mengeluarkan Inpres NO.4/1999 yang menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SRKRI) dan izin penerjemahan bahasa Mandarin

Sehingga dapat kita lihat bahwa keberadaan kebijakan-kebijakan ini merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap hak asasi etnis Tionghoa sebagai warga negara dimana unsur pluralitas juga lebih diutamakan sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaan mereka.

F. Hipotesa

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan di atas dan didukung oleh kerangka pemikiran, maka dapat ditarik suatu hipotesa sebagai berikut:

Peningkatan peranan etnis Tionghoa dalam politik praktis Indonesia terjadi karena:

- Lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpaham integrasi.
- Timbulnya perasaan aman bagi etnis Tionghoa untuk berperan dalam politik praktis Indonesia.

G. Jangkauan Penelitian

Kajian untuk pembahasan masalah ini maka penulis akan memberikan jangkauan penulisan pada masa 1998-2004. Akan tetapi pembatasan ini tidak menutup kemungkinan untuk membahas kejadian-kejadian di luar batasan ini sepanjang hal-hal tersebut masih berkaitan pokok dengan penelitian ini.

H. Metode Penelitian

Disini penulis mencoba meneliti permasalahan ini dengan menerapkan metode studi kepustakaan (*library-research*) dengan menggunakan data-data sekunder yaitu

data-data yang tersedia dari literatur buku-buku, majalah, jurnal serta informasi lainnya.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran/teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, serta kerangka penulisan.

BAB II : Pada bab ini akan menjelaskan tentang dinamika keterlibatan Etnis Tionghoa dalam politik praktis Indonesia, dari masa Orde lama hingga masa era reformasi.

BAB III : Dalam bab ketiga ini akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Tionghoa di Indonesia.

BAB IV : Pada bab ini akan menjawab pertanyaan dari pokok permasalahan yang diajukan diatas, yaitu peranan etnis Tionghoa dalam politik praktis Indonesia pada masa reformasi.